

Judul : RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas 2026

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. DPR menilai, RUU ini penting untuk mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel penyadapan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah Prolegnas Prioritas 2026 dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Selain RUU Penyadapan, RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi juga dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Keduanya merupakan usulan dari Baleg DPR.

Selain itu, lima RUU disetujui untuk dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. Empat RUU di antaranya merupakan usulan Baleg DPR, yakni RUU Hukum Acara Pidana, RUU Kejaksaan,

RUU Surat Berharga (Patriot Bond), dan RUU Daya Anagata Nusantara.

Satu RUU lainnya yang diusulkan pemerintah yakni RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikeluarkan karena sudah disahkan pada 2 Oktober 2025.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, penambahan dan pengurangan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026 mempertimbangkan kebutuhan hukum nasional. Selain itu guna memastikan target kerja legislasi lebih realistis dan dapat tercapai maksimal pada 2026.

Empat RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026 akan dikembalikan ke Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Adapun RUU Penyadapan serta RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi akan dibahas di Baleg DPR.

Beban legislasi

Sebelum perubahan Prolegnas 2026 disepakati, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan meng-

ingatkan beban kerja Baleg DPR ke depan. Dari 12 RUU yang menjadi tugas Baleg pada 2025, baru dua RUU yang bisa diselesaikan, yakni RUU Statistik dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

"Termasuk juga beban legislasi kita kaitannya dengan kumulatif terbuka, ada beberapa, termasuk respons kita atas kebutuhan masyarakat. Jadi, saya membayangkan beban kerja Baleg sangat berat di 2026," ujarnya.

Ia pun meminta pimpinan Baleg DPR agar menyusun dan memperketat kriteria atau daftar RUU yang memang jadi prioritas. Jika tak sanggup, seharusnya RUU itu dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Darmadi Durianto, mengkhawatirkan tambahan RUU usulan Baleg DPR tersebut akan menurunkan produktivitas legislasi.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung meminta tenaga ahli Baleg DPR agar menyisir

lagi RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026 yang paling mendesak dibahas dan menjadi fokus pemerintah. Hal tersebut juga perlu dikonsultasikan ke pemerintah.

Edward sepakat dengan perubahan Prolegnas Prioritas 2026. Ia hanya menegaskan bahwa sejumlah RUU di Prolegnas Prioritas 2026 merupakan luncuran. Prolegnas Prioritas 2025, seperti RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Kewarganegaraan.

"Jadi, kalau ditanya yang prioritas, terkait RUU Penyesuaian Pidana. Sementara yang lain adalah luncuran. Dan sekarang, RUU Penyesuaian Pidana sedang dibahas (di Komisi III DPR). Ini diagendakan (akan disahkan) dalam rapat paripurna, paling lambat 9 Desember, harus sudah diketok. Sebab, ini adalah pelengkap untuk melaksanakan KUHP nasional pada 2 Januari 2026," katanya.

Selain itu, Edward mengungkapkan, RUU lain yang menjadi sangat prioritas untuk dibahas di 2026 adalah RUU Advokat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan, dari hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap RUU prakarsa pemerintah di Prolegnas Prioritas 2025, dua RUU di antaranya sudah disahkan DPR dan pemerintah, yakni RUU BUMN dan RUU Pengelolaan Ruang Udara.

Tiga RUU dalam proses pembahasan tingkat satu, yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, dan RUU Penyesuaian Pidana. Sementara dua RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR, yakni RUU Desain Industri dan RUU Hukum Perdata Internasional.

Empat RUU, yakni RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Ketenagakerjaan, dalam proses permohonan surat presiden. Dua RUU masih berproses di internal pemerintah, yaitu RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (BOW).